

## PEMBANGUNAN DESA MANDIRI MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA: STUDI KASUS DESA TIREMENGAL

M. Shofi Anshori<sup>1\*</sup>, Muhammad Aris Syafi'i<sup>2</sup>, Happy Sista Devi<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

*Corresponding Author: mshofianshori@mhs.uingusdur.ac.id*

### ABSTRAK

Desa sebagai unit komunitas memiliki peran penting dalam pembangunan di Indonesia. Namun, banyak desa masih menghadapi tantangan besar, seperti kemiskinan, kurangnya partisipasi masyarakat, dan rendahnya modal sosial. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia telah memperkenalkan berbagai program, termasuk Program Desa Mandiri yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis strategi pengelolaan BUMDES dalam mewujudkan desa mandiri, dengan fokus pada Desa Tiremenggal di Jawa Timur. Melalui analisis strategi manajemen, implementasi strategi BUMDES, dan evaluasi strategi yang dilakukan dalam penelitian ini, ditemukan bahwa Desa Tiremenggal telah berhasil memanfaatkan potensi alam dan sumber daya manusia untuk meningkatkan ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. BUMDES telah menjadi kunci dalam memajukan desa ini melalui berbagai program dan proyek pembangunan, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan desa. Namun, penelitian juga mengidentifikasi beberapa faktor penghambat, seperti perbedaan pemahaman dan pendapat dalam masyarakat serta kualitas sumber daya manusia yang perlu diperbaiki. Kesimpulannya, pembangunan desa mandiri membutuhkan kerja sama antara pemerintah, BUMDES, dan masyarakat. Dengan memanfaatkan potensi lokal dan mengatasi hambatan yang ada, desa-desa di Indonesia dapat mencapai kesejahteraan dan kemandirian yang berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Pembangunan Desa Mandiri, Badan Usaha Milik Desa, Kesejahteraan Masyarakat

### ABSTRACT

*Village is a fundamental community unit in Indonesia's development landscape. However, many villages still face significant challenges, such as poverty, lack of community participation, and low social capital. To address these issues, the Indonesian government has introduced various programs, including the Independent Village Program managed by Village-Owned Enterprises (BUMDES). This research employs a qualitative descriptive approach to analyze BUMDES management strategies in realizing independent villages, with a focus on Tiremenggal Village in East Java. Through the analysis of strategic management, implementation of BUMDES strategies, and evaluation of strategies conducted in this research, it is found that Tiremenggal Village has successfully utilized natural resources and human resources to enhance social, economic, and environmental resilience. BUMDES has been instrumental in advancing this village through various development programs and projects, as well as increasing community involvement in village management. However, the research also identifies several inhibiting factors, such as differences in understanding and opinions within the community, as well as the need to improve the quality of human resources. In conclusion, the development of independent villages requires cooperation between the government, BUMDES, and the community. By leveraging local potentials and addressing existing barriers, villages in Indonesia can achieve sustainable prosperity and self-reliance.*

**Keywords:** Independent Village Development, Village-Owned Business Entities, Public Welfare

## PENDAHULUAN

Desa adalah suatu kesatuan hukum yang mempunyai batas wilayah, urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan, serta kekuasaan pengawasan dan pengendalian hak-hak hukum. Republik Indonesia (Pasal 1 Angka 6 UU Desa Tahun 2014): Negara mempunyai tugas politik dan konstitusional untuk melindungi desa dan memberikan kesempatan kepada desa untuk menjadi kuat, progresif, mandiri, dan demokratis. (Wibowo, 2022) Hal ini menjadikan desa bukan sekedar tempat untuk mengambil kebijakan; Hal ini tidak hanya menjadi kewajiban bagi desa menurut undang-undang, namun juga dapat menjadi sumber penting dalam memantau perubahan desa agar desa menjadi mandiri. bantuan pedesaan (Susanti, 2017).

Indeks Desa Berkembang (IDM) yang merupakan bagian dari Buku RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2015–2019, ditetapkan pemerintah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan desa dan perdesaan. (Caya, 2019) Untuk mengurangi jumlah desa tertinggal menjadi 5000 desa dan meningkatkan jumlah desa mandiri minimal 2000 desa pada tahun 2019, RJP MN mempunyai dua tujuan strategis. Untuk mencapai tujuan pembangunan, diperlukan pemahaman yang jelas tentang status perkembangan setiap desa. Indeks desa berkembang dapat digunakan untuk mengetahui status pembangunan masing-masing desa dilihat dari karakteristiknya. Hal ini juga dapat dikembangkan sebagai alat untuk mencapai sasaran RPJMN 2015–2019 (Nur Arifah & Kusumastuti, 2019).

Untuk Jawa Timur, ada lima (atau lima) masalah strategi yang menunjukkan bahwa bantuan sangat penting. Diantaranya adalah: tingkat kemiskinan yang relatif tinggi; kurang partisipasi komunitas dan organisasi desa dalam perencanaan, (hidayah, 2019) pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan desa serta mempertahankan hasil pembangunan; rendahnya modal sosial karena kehilangan nilai-nilai dan kebiasaan budaya; dan kurangnya kesadaran masyarakat dan organisasi tentang pentingnya pendampingan (Susanti, 2017).

Kemiskinan merupakan permasalahan besar yang harus diselesaikan dalam upaya mengurangi jumlah desa tertinggal dan membangun desa yang lebih mandiri. Pemerintah Indonesia selama ini tidak pernah menjadikan kemiskinan sebagai prioritas utama, hal ini disebabkan oleh kesadaran pemerintah akan pentingnya penanggulangan kemiskinan, dan penanggulangan permasalahan tersebut dapat menyebabkan munculnya beberapa permasalahan sosial, ekonomi, dan politik di masyarakat. (Muhamad, 2022) Menurut Mubyarto yang dikutip Erwan Agus Purwanto, pemerintah di Indonesia melakukan upaya signifikan dalam mengentaskan kemiskinan pada tahun 1976-1996 dengan menurunkan angka kemiskinan dari 40% menjadi 11%. Namun karena tidak memiliki fasilitas dan infrastruktur yang memadai, orang-orang miskin biasanya mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya. Selain itu, kurangnya akses ke uang menyebabkan komunitas yang lebih miskin menjadi lebih tertekan (Nur Arifah & Kusumastuti, 2019).

## **METODE PENELITIAN**

Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam penelitian ini. Fokus penelitian digunakan untuk membatasi penelitian agar fokus dan tidak melebar. Tiga fokus penelitian adalah sebagai berikut: ke satu analisis strategi pengelolaan BUM Desa Kertoraharjo melalui tiga tahapan berdasarkan teori manajemen strategis: Tahap Perumusan Strategi, Tahap Implementasi Strategi dan Tahap Evaluasi Strategi. Tahap kedua melibatkan analisis bagaimana strategi BUM Desa diterapkan untuk mewujudkan Desa Mandiri, seperti yang ditunjukkan oleh Indeks Desa Membangun, yang terdiri dari Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). Tahap ketiga melibatkan analisis faktor yang mendorong keberhasilan pengelolaan BUM Desa Tiremenggal dan faktor yang menghalangi keberhasilan pengelolaan BUM Desa Dalam penelitian ini, observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pembangunan Desa Mandiri**

Tersedianya berbagai proyek dan program pembangunan yang ditujukan untuk mendorong kemajuan desa merupakan salah satu jenis pembangunan desa. Program ini bertujuan untuk mengembangkan bakat masyarakat selain peningkatan fisiknya. Dengan demikian, pembangunan mengacu pada sesuatu yang lebih luas dari sekedar sesuatu yang baru dalam arti fisik. Peningkatan dan peningkatan taraf hidup masyarakat desa merupakan salah satu tujuan pembangunan desa. Dusun yang dapat menghidupi dirinya sendiri tanpa bergantung sepenuhnya pada pemerintah dikatakan mandiri. Walaupun pemerintah membantu, itu hanya sekedar motivator atau stimulus. (Rahayu, 2021) Desa yang mandiri adalah desa yang terorganisir dengan baik, memiliki struktur kepengurusan yang kuat, menghasilkan pendapatan yang cukup bagi masyarakat, dan tidak bergantung pada bantuan pemerintah (Faedlulloh, 2018).

Penyediaan sarana dan prasarana menjadi prioritas utama bagi desa maju atau mandiri, sesuai Bab 3, Pasal 7 dan 9 Keputusan Menteri Desa dan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Imigrasi Nomor 21 Tahun 2015 yang diterbitkan oleh Pemerintah. Menteri PDTT. Tindakan pembangunan yang berdampak pada pertumbuhan komunitas investasi dan cakupan ekonomi. Hal ini melibatkan pertumbuhan BUMDesa untuk menciptakan lapangan kerja, pengumpulan teknologi relevan, dan inisiatif desa untuk menarik investasi. Kedua, ketika mengorganisir inisiatif pembangunan masyarakat, seperti mengubah desa menjadi pusat keuangan atau modal masyarakat, membantu desa dalam memperoleh otonomi atau kemandirian ekonomi, dan mengembangkan potensi manusia atau ekonomi, kami akan menciptakan inisiatif pembangunan masyarakat proaktif yang akan mengakui itu (Kirowati, D., & Setia, 2018).

## Badan Usaha Milik Desa

Mengenai pentingnya program ini dalam struktur politik negara kesatuan Republik Indonesia, sejumlah ahli mempunyai pandangan berbeda. Program diartikan sebagai “diagram kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan atau penafsiran pedoman kebijakan atau strategi untuk mencapai tujuan”, menurut Suharjo (Palupi, 2021) Badan Usaha Milik Desa membawahi Program Desa Mandiri (BUMDES). Dalam hal pelayanan, kesejahteraan, pendidikan, dan perekonomian, desa tertinggal jauh dibandingkan kota (Cahyani, 2019). Kesejahteraan masyarakat desa tidak membaik meskipun pemerintah telah melaksanakan berbagai program untuk mendorong pembangunan desa. Jawaban atas permasalahan yang muncul di masyarakat adalah Bumdes (Kusnawari, 2022).

## Kesejahteraan masyarakat

Adam Smith menegaskan bahwa dalam bukunya *The Wealth of Nations*, ia menekankan pentingnya pembagian kerja dan pasar bebas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Adawiyah, 2018) Menurut teorinya tentang tangan tak terlihat, mereka yang bertindak di pasar demi kepentingan pribadinya pada akhirnya akan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sementara itu, John Maynard Keynes berpendapat bahwa filosofinya yang dikenal dengan Keynesianisme sangat menekankan peran pemerintah dalam mengendalikan perekonomian guna meningkatkan taraf hidup. (Hailudin, 2021) Keynes menyarankan intervensi kebijakan moneter dan fiskal untuk mengurangi pengangguran dan mendorong ekspansi ekonomi. Oleh karena itu, bagaimana persepsi masyarakat terhadap manfaat BUMDES akan menentukan kesejahteraaannya.

Di atas sudah ada beberapa teori terkait jurnal ini dan dilanjutkan dengan beberapa tahap analisis data yang sudah kami dapatkan melalui wawancara beberapa pihak yang terkait sesuai dengan metode di atas, diantaranya sebagai berikut:

1. Tahap Manajemen Strategi
  - a. Perencanaan untuk mengidentifikasi strategi optimal merupakan langkah pertama dalam proses manajemen strategis. Menciptakan visi dan misi, mengidentifikasi kemungkinan, dan mencari strategi dari luar semuanya termasuk dalam hal ini. Menentukan rencana tertentu, menetapkan tujuan jangka panjang, mengidentifikasi kekuatan dan keterbatasan internal, mengembangkan strategi alternatif, dan mengenali tantangan saat ini. Untuk mencapainya adalah tujuan dari tindakan ini.
  - b. Tahap Implementasi Strategi: Untuk membantu BUM Desa mencapai tujuannya dengan memberikan bantuan kepada masyarakat, tahap ini memerlukan pembuatan program dan implementasi strategi. Struktur kepengurusan organisasi dibuat berdasarkan bakat dan keterampilan anggota untuk menjamin kelancaran operasional BUM Desa.
  - c. Tahap Evaluasi Strategi: Tujuan fase ini adalah untuk menilai strategi yang digunakan. Memeriksa variabel internal dan eksternal yang menjadi dasar strategi adalah tugas utama evaluasi strategi.

## 2. Implementasi Strategi BUM Desa dalam Mewujudkan Desa Mandiri

Indeks Desa Membangun dibuat oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan terdiri dari beberapa komponen, termasuk:

- a. Indeks Ketahanan Sosial (IKS) Seiring berkembangnya Dusun Banmenggol menjadi dusun mandiri, sejumlah komponen IKS telah terintegrasi. Organisasi kunci dalam mencapai Indeks Ketahanan Sosial (IKS) adalah BUMDES. Menurut Pak Mupid, sejak berdirinya BUMDES telah berkomitmen untuk meningkatkan ketahanan sosial Desa Tiremenggol. BUMDES telah banyak melaksanakan inisiatif untuk meningkatkan ketahanan sosial di bidang pendidikan. Salah satu inisiatif tersebut adalah dengan menawarkan dukungan PKH kepada anggota masyarakat, khususnya mereka yang terdaftar di sekolah menengah atas dan mengalami kesulitan keuangan.
- b. Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) Faktor ekonomi menjadi salah satu pertimbangan Desa Tiremenggol. Kehadiran BUMDES membantu pertumbuhan perekonomian Desa Tiremenggol. Pak Isman, Kamituwo menyatakan meskipun perekonomian desa berkembang pesat, namun belum semua warga desa merasakan manfaatnya. Perekonomian desa tumbuh karena masyarakat yang tadinya menganggur bisa bekerja sebagai pedagang. Berbeda dengan dahulu, masyarakat sekarang mempunyai pendapatan tetap. Purwodadi merupakan rumah bagi sekitar 70 pekerja di BUMDES. Hal ini menunjukkan betapa berkembangnya perekonomian Desa Tiremenggol sejak berdirinya BUMDES.
- c. Kualitas lingkungan hidup, potensi bencana, dan tanggap bencana merupakan unsur-unsur yang membentuk Indeks Ketahanan Lingkungan Hidup (IKL) (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2016). Kepala Desa Tiremenggol Bapak Sumain menyatakan bahwa lingkungan menerima 5% dari AD/ART. BUM Desa Tiremenggol juga menawarkan wisata edukasi tentang lingkungan dalam upaya menjaganya. Penelitian jenis bambu di Desa Tiremenggol merupakan salah satu upaya untuk mendukung Indeks Ketahanan Lingkungan.

## 3. Faktor pendorong dan penghambat pengelolaan BUM Desa Tiremenggol

### a. Faktor Pendorong

Hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi disebut dengan faktor pendorong. Pengelolaan BUMDES Tiremenggol menggunakan dua kategori faktor pendorong yaitu pengelolaan sumber daya manusia dan potensi desa, guna mewujudkan desa mandiri. Lahan seluas 36,8 hektar yang disediakan Desa Tiremenggol untuk keperluan alam merupakan rumah bagi sekitar 72 spesies bambu berbeda, yang dapat dimanfaatkan penduduk setempat untuk konstruksi, kerajinan tenun, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Sebelum berdirinya BUMDES, masyarakat hanya mengandalkan kebutuhan sehari-hari dari bambu. Selain itu, bambu dijual tanpa diolah terlebih dahulu. Faktor lain yang memungkinkan terjadinya transisi BUMDES menuju permukiman mandiri adalah ketersediaan sumber daya manusia.

## b. Faktor penghambat

Itu semua adalah hal-hal yang tidak terlalu mempengaruhi atau menghambat pencapaian perusahaan. Faktor pendukung dan penghambat selalu ada secara berdampingan. Ada beberapa tantangan yang harus diatasi oleh penyelenggaraan BUMDES untuk mewujudkan masyarakat otonom. Salah satunya, buruknya permasalahan sosial, ekonomi, dan infrastruktur di desa tersebut menimbulkan kritik dari masyarakat atas pendirian BUMDES. Masyarakat merasa bahwa dibandingkan mendirikan BUMDES, lebih baik menggunakan keuangan daerah untuk memperbaiki infrastruktur. Kendala lainnya adalah kesenjangan pendapat dan pemahaman. Kendala lainnya adalah kualitas sumber daya manusia yang dipekerjakan oleh perusahaan. Mengingat lebih dari 60% personel BUMDES bergelar sarjana, Mas Aris, Direktur Jenderal BUMDES Tiremenggall, menyatakan salah satu kendalanya adalah sumber daya manusia.

## KESIMPULAN

Desa Tiremenggall merupakan desa yang sedikit maju di bandingkan dengan desa yang disekitarnya dan jurnal ini menjelaskan bagaimana mengembangkan desa atau membentuk desa mandiri dengan beberapa metode diantaranya Tahap Manajemen Strategi (Tahap perumusan strategi, Tahap Implementasi Strategi, Tahap Evaluasi Strategi) dan ada juga Implementasi Strategi BUM Desa dalam Mewujudkan Desa Mandiri (Indeks Ketahanan Sosial di desa Tiremenggall memakai metode bantuan kemasyarakatan yang tidak mampu membayar sekolah anaknya dengan menggunakan dana dari bumdes itu sendiri, Indeks Ketahanan Ekonomi di desa Tiremenggall juga termasuk desa yang berubah perekonomiannya menjadi jauh meningkat di sebabkan adanya bumdes tersebut diantaranya Masyarakat ikut andil dalam bumdes tersebut, Indeks Ketahanan Lingkungan di desa Tiremenggall juga Sebagian dari penghasilan bumdes 5% untuk alokasi kebersihan desa dan juga mengutamakan menjaga lingkungan) yang terakhir ada Faktor pendorong diantaranya ada masyarakat yang mendukung dengan mengaca desa yang sudah punya bumdes yang maju dan juga potensi desa yang cukup memadai untuk di kembangkan, dan penghambat pengelolaan BUM Desa Tiremenggall biasanya stigma Masyarakat yang baru mendengar Ketika ada pembentukan bumdes akan muncul pikiran lebih baik dananya buat memperbaiki infrastruktur yang rusak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R. (2018). *Strategi pengembangan badan usaha milik desa (bumdes) berbasis aspek modal sosial (studi pada bumdes surya sejahtera, Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo)* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga)
- Cahyani, E., Guspul, A., & Wijayanti, R. (2019). Analisis Pengaruh Bumdes Dalam Menopang Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo (Studi Empiris Pada Bumdes Silatri Indah Desa Beran Dan Bumdes Srikandi Desa Ropoh). *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 1(1), 32-39

- Caya, M. F. N., & Rahayu, E. (2019). Dampak Bumdes Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Aik Batu Buding, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 20(1), 1-12
- Faedlulloh, D. (2018). BUMDes dan kepemilikan warga: membangun skema organisasi partisipatoris. *Journal of Governance*, 3(1)
- Hailudin, H. (2021). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Labuhan Haji Lombok Timur. *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(1), 1-9
- Hidayah, U., Mulatsih, S., & Purnamadewi, Y. L. (2019). Evaluasi badan usaha milik desa (bumdes): Studi kasus bumdes harapan jaya desa pagelaran, kecamatan ciomas, kabupaten bogor. *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 3(2), 144-153
- Kirowati, D., & Setia, L. D. (2018). Pengembangan Desa Mandiri Melalui BUMDes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Jurnal Politeknik Negeri Madiun*, 1(254-3198), 9
- Kusnawari, L. (2022). *Efektivitas Program Desa Mandiri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*
- Muhamad, M., Budiani, S. R., Chamidah, N., Kardiyati, E. N., & Adjie, M. (2022). Peran Bumdes dalam Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan di Lereng Sumbing, Desa Temanggung, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang. *Yumary: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(4), 211-220
- Nur Arifah, M., & Kusumastuti, N. (2019). Strategi Mempercepat Pembangunan Desa Mandiri: Studi Di Desa Kemadang Gunungkidul. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan*, 2(1), 169-188. <https://doi.org/10.14421/jpm.2018.021-09>
- Palupi, A. I. (2021). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi Desa (Studi Kasus BUMDes di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 9(2)
- Rahayu, S., & Febrina, R. (2021). Pemberdayaan masyarakat desa melalui BUMDes di Desa Sugai Nibung. *Jurnal Trias Politika*, 5(1), 49-61
- Susanti, M. H. (2017). Peran Pendamping Desa Dalam Mendorong Prakarsa Dan Partisipasi Masyarakat Menuju Desa Mandiri Di Desa Gonoharjo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal. *Integralistik*, 28(1), 29-39. <https://doi.org/10.15294/integralistik.v28i1.11809>
- Wibowo, M. I. S., & Hapsari, A. N. S. (2022). Pengelolaan Keuangan BUMDes: Upaya Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 9(1), 52-71